

# PENGELOLAAN KEUANGAN DESA BERBASIS APLIKASI SISKEUDE DI DESA KEBUN DURIAN KABUPATEN KAMPAR

Oleh : Rahayu Wildiani

Email : [rahayuwildiani@gmail.com](mailto:rahayuwildiani@gmail.com)

Pembimbing : Zulkarnaini

Program Studi Ilmu Administrasi Publik - Jurusan Ilmu Administrasi

Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik

Universitas Riau

Kampus Bina Widya, Jl. H.R. Soebrantas Km 12,5 Simp. Baru, Pekanbaru 28293

Telp/Fax. 0761632777

## *Abstract*

*The existence of Law No. 6 of 2014 gives villages the opportunity to manage their own governance, including managing village finances. Village financial management itself consists of five stages, namely the planning, implementation, administration, reporting, and accountability stages. To support effective and efficient village financial management, the government through the Finance and Development Supervisory Agency (BPKP) and the Directorate General of Village Government Development, the Ministry of Home Affairs, collaborated to create an application called the Village Financial System (Siskeudes). Where Siskeudes is designed and refers to Permendagri Number 20 of 2018 concerning Village Financial Management. This study aims to determine the village financial management process based on the Village Financial System (Siskeudes) application in Kebun Durian Village, Kampar Regency. The method used in this research is descriptive qualitative, in which the researcher describes events or incidents in the field. The results of this study indicate that village financial management based on the Siskeudes application in Kebun Durian village is in accordance with Permendagri Number 20 of 2018 concerning Village Financial Management. Where all stages starting from planning, implementation, administration, reporting, and accountability have been carried out properly. However, there are still obstacles in the process, namely inadequate human resources, complete facilities and lack of training regarding the Siskeudes application. This study concludes that the Siskeudes application is very helpful for village officials in managing finances and making accountability reports, even though there are several obstacles in the process of operating it, and it is hoped that the village government can overcome some of these obstacles.*

**Keywords:** *Village Financial Management, Siskeudes*

## **PENDAHULUAN**

### **Latar Belakang**

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa menyatakan keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa yang diatur dan dikelola oleh desa. pengelolaan keuangan desa merupakan upaya untuk mendukung penyelenggaraan pemerintah desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat desa.

Pengelolaan keuangan merupakan suatu siklus yang terdiri dari perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan serta pemantauan dan evaluasi. Siklus tersebut merupakan rangkaian terpadu dan terintegrasi, dimana tahap satu dengan tahap lainnya saling berkesinambungan sehingga apabila terjadi kesalahan dalam salah satu tahap maka untuk tahap berikutnya pun akan terganggu dan tujuan pengelolaan keuangan tidak sesuai dengan sasaran.

Penyelenggaraan pemerintahan desa tentunya tak terlepas dari faktor keuangan untuk kelangsungan operasional pemerintahan desa. Untuk menciptakan pengelolaan keuangan desa yang efektif dan efisien diperlukan pengelolaan keuangan yang mengacu pada tahapan pengelolaan keuangan itu sendiri. Pemerintahan desa diharapkan untuk lebih mandiri dalam mengelola pemerintahan dan berbagai sumber daya alam yang dimiliki, termasuk di dalamnya pengelolaan keuangan dan kekayaan milik desa.

Begini besar peran yang diterima oleh desa, tentunya disertai dengan tanggungjawab yang besar pula. Oleh karena itu pemerintah desa harus bisa menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam tata pemerintahannya,

dimana semua akhir kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat desa sesuai dengan ketentuan.

Kenyataan yang terjadi saat ini terkait Pengelolaan Keuangan Desa, secara prinsip masih banyak desa yang memiliki permasalahan terkait laporan keuangan desa ini, antara lain: 1) Sering terjadi keterlambatan laporan keuangan dalam penyampaian dari desa ke Kecamatan, 2) Masih lemahnya skill (keterampilan) terkait kreativitas laporan keuangan, 3) Masih lemahnya infrastruktur terkait teknologi informasi (internet), 4) Dalam laporan keuangan yang dibuat oleh desa selama ini masih bersifat konvensional (tradisional).

Salah satu bentuk komitmen dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk mengawal akuntabilitas keuangan dan pembangunan nasional, serta sebagai salah satu bentuk pengawasan dalam pengelolaan keuangan desa pemerintah pusat mengimplementasikan aplikasi yang berbasis daring (online) untuk pemerintahan desa yaitu aplikasi Siskeudes.

Aplikasi Siskeudes adalah aplikasi yang dikembangkan bersama Permendagri sebagai regulator sehingga hasil dari penggunaan aplikasi tersebut akan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Tujuan adanya kebijakan Siskeudes dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) tidak lepas dari berbagai faktor yang mempengaruhi agar pelaksanaan kebijakan Siskeudes dapat sesuai dengan apa yang diharapkan pemerintahan.

Desa Kebun Durian Kecamatan Gunung Sahilan Kabupaten Kampar merupakan salah satu desa yang sudah menerapkan aplikasi Siskeudes dalam pengelolaan keuangan desa. Di Desa Kebun Durian aplikasi Siskeudes sudah diterapkan pada awal tahun 2016 setelah

peluncuran aplikasi Siskeudes pada November 2015. Terdapat beberapa kendala dalam pengoperasian aplikasi Siskeudes karena jaringan internet yang belum bagus, Sumber Daya Manusia (SDM) perangkat desa yang kurang memadai juga menjadi kendala dalam penerapan aplikasi Siskeudes.

Adanya aplikasi Siskeudes ini, menjadi kewajiban baru bagi pemerintah desa untuk menerima dan memanfaatkannya dalam mengelola keuangan desa. Dari uraian diatas peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “ **Pegelolaan Keuangan Desa Berbasis Aplikasi Siskeudes Di Desa Kebun Durian Kabupaten Kampar**”

### **Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana Pengelolaan Keuangan Desa berbasis Aplikasi Siskeudes di Desa Kebun Durian Kabupaten Kampar?
2. Apa saja faktor penghambat dalam Pengelolaan Keuangan Desa berbasis Aplikasi Siskeudes di Desa Kebun Durian Kabupaten Kampar?

### **Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan di atas, maka penelitian bertujuan untuk:

1. Untuk menganalisis Pengelolaan Keuangan Desa berbasis Aplikasi Siskeudes di Desa Kebun Durian Kabupaten Kampar.
2. Untuk menganalisis faktor penghambat dalam Pengelolaan Keuangan Desa berbasis Aplikasi Siskeudes di Desa Kebun Durian Kabupaten Kampar.

### **Manfaat Penelitian**

Manfaat yang ingin dicapai pada penelitian dibagi dua, sebagai berikut;

1. **Manfaat Akademis**  
Untuk menambah referensi kepustakaan di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik khususnya Program studi Ilmu Administrasi Publik, serta menjadi sumbangan pemikiran yang nantinya bisa digunakan untuk membantu peneliti-peneliti berikutnya yang membahas permasalahan yang sama.
2. **Manfaat Praktis**
  - a. Bagi aparat desa, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi khusus dan masukan mengenai peranan Siskeudes dalam pengelolaan keuangan desa dan pengembangan sistem informasi akuntansi di desa.
  - b. Bagi masyarakat, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi mengenai pengelolaan keuangan desa secara transparan dan akuntabel.
  - c. Bagi peneliti, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan baru untuk menambah pengetahuan mengenai penerimaan aparat desa terkait aplikasi Siskeudes dan peran aplikasi siskeudes dalam pengelolaan keuangan desa dan pengembangan sistem informasi di desa.

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **Pengelolaan Keuangan Desa**

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa menyatakan bahwa “Keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa”. Hak dan kewajiban dimaksud

sesuatu menimbulkan pendapatan, belanja, pembiayaan dan pengelolaan dana desa. Dalam Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 Pasal 1 Ayat 6 menyebutkan “Pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa”. Berikut tahapan pengelolaan keuangan desa berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa:

#### 1. Tahapan Pengelolaan Keuangan Desa

Pengelolaan keuangan desa terbagi menjadi 5 bagian yaitu perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban (Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 20 tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa). Adapun penjabaran dari peraturan pemerintah Nomor 20 tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa adalah sebagai berikut:

- a. Perencanaan  
Perencanaan yang merupakan proses untuk menentukan dengan tepat tindakan di masa yang akan datang, melalui tahapan pilihan dan dengan memperkirakan sumber daya yang tersedia.
- b. Pelaksanaan  
Pelaksanaan merupakan seluruh proses pengeluaran dan penerimaan dilakukan menggunakan rekening kas desa dengan dukungan bukti yang lengkap dan sah. Bendahara dapat menyimpan uang dalam rekening desa dan besarnya diterapkan oleh Bupati/Walikota.
- c. Penatausahaan  
Penatausahaan pengelolaan keuangan desa merupakan kegiatan mengatur keuangan desa untuk mewujudkan asas pengelolaan keuangan desa yang meliputi asas transparan dan asas akuntabel.
- d. Pelaporan

Pelaporan yang merupakan suatu kewajiban yang harus dilakukan oleh aparat desa kepada Pemerintah Daerah dan pelaporan haruslah dilaksanakan secara tepat waktu dan bersifat akurat. Setelah melalui tahapan pelaporan.

- e. Pertanggungjawaban  
Pertanggungjawaban merupakan proses penyampaian laporan kegiatan keuangan desa, baik itu penerimaan, pengeluaran, pembiayaan selama satu tahun anggaran. Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes disampaikan oleh kepala desa kepada bupati/walikota setiap akhir tahun anggaran.
- #### 2. Asas Pengelolaan Keuangan Desa

Pengelolaan Keuangan Desa harus dikelola berdasarkan praktik-praktik pemerintahan yang baik dengan asas transparansi, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Selain itu, Berikut merupakan Asas-asas Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana tertuang dalam Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa yaitu:

- a. Transparansi  
Transparansi artinya terbuka/keterbukaan, dalam arti segala kegiatan dan informasi terkait pengelolaan keuangan desa dapat diketahui dan diawasi oleh pihak lain yang berwenang. Transparansi dalam pengelolaan keuangan diartikan bahwa informasi keuangan diberikan secara terbuka dan jujur kepada masyarakat. Fungsinya, untuk memenuhi hak masyarakat untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang ada. Transparansi artinya kewajiban bagi para pengelola

untuk menjalankan prinsip keterbukaan dalam proses keputusan dan penyampaian informasi. keterbukaan dalam menyampaikan informasi juga mengandung arti bahwa informasi yang disampaikan harus lengkap, benar, dan tepat waktu kepada semua pemangku kepentingan. Tidak boleh ada hal-hal yang dirahasiakan, disembunyikan, ditutup-tutupi, atau ditunda-tunda (Sayuti, Majid, dan Juardi 2018).

- b. Akuntabel  
Akuntabel diartikan bahwa setiap tindakan atau kinerja pemerintah/lembaga dapat dipertanggungjawabkan kepada pihak-pihak yang memiliki hak atau berkewenangan untuk meminta keterangan akan pertanggungjawaban. Dengan demikian, pelaksanaan kegiatan dan penggunaan anggaran harus dapat dipertanggungjawabkan dengan baik, mulai dari proses perencanaan sampai dengan pertanggungjawaban.
- c. Partisipatif  
Partisipatif diartikan bahwa setiap tindakan dilakukan dengan mengikutsertakan keterlibatan masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung melalui lembaga perwakilan yang dapat menyalurkan aspirasinya. Dalam Pengelolaan keuangan desa dari tahap perencanaan sampai pertanggungjawaban wajib melibatkan masyarakat para pemangku kepentingan didesa serta masyarakat luas. Utamanya, kelompok marjinal sebagai penerima manfaat dari kegiatan pembangunan desa.
- d. Tertib dan disiplin anggaran  
Tertib dan disiplin anggaran diartikan bahwa anggaran harus

dilaksanakan secara konsisten dengan pencatatan atas penggunaannya sesuai dengan prinsip akuntansi keuangan di desa. Hal ini dimaksudkan bahwa pengelolaan keuangan desa harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### **Aplikasi Siskeudes**

Aplikasi Sistem keuangan desa adalah aplikasi yang dapat digunakan untuk membantu pemerintah desa mengelola keuangan desa mulai dari tahap perencanaan hingga tahap pelaporan atau pertanggungjawaban. Aplikasi Siskeudes ini adalah sistem yang dibuat sesuai dengan peraturan yang berlaku, khususnya Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Sistem keuangan desa adalah bentuk perbaikan dari pemerintah dalam mengelola laporan keuangan desa, memudahkan proses pertanggungjawaban keuangan desa agar menjadi lebih efektif, efisien dan transparan. Pengelolaan keuangan desa diperlukan adanya akuntabilitas dan keterbukaan dari pemerintah desa agar penatausahaan desa menjadi lebih baik. Keuangan desa dapat dilaksanakan dengan baik sehingga mampu meningkatkan kinerja pemerintah desa. Mengelola keuangan desa dapat dikatakan rumit maka dari itu perlu adanya sebuah sistem yang disusun secara profesional.

Aplikasi Siskeudes ditujukan kepada aparat desa guna mempermudah pengelolaan keuangan desa dari tahap perencanaan hingga tahap pertanggungjawaban. Prosedur penggunaan aplikasi siskeudes oleh pemerintah desa dilakukan melalui permohonan dari pemerintah daerah untuk penggunaan aplikasi Siskeudes kepada Kemendagri atau Perwakilan BPKP setempat. Tujuannya adalah agar penggunaan aplikasi siskeudes dikoordinasikan oleh pemerintah daerah sehingga dapat diterapkan pada seluruh

desa yang ada pada wilayah pemerintah daerah yang bersangkutan.

Aplikasi Siskeudes memiliki beberapa kelebihan yaitu:

- a. Sesuai dengan regulasi pengelolaan keuangan desa yang berlaku,
- b. Memudahkan tata kelola keuangan desa dan dana desa,
- c. Kemudahan dalam penggunaan untuk level pemerintah desa,
- d. Didukung dengan petunjuk pelaksanaan implementasi dan manual aplikasi,
- e. Dibangun dan dikembangkan dengan melibatkan seluruh pihak yang terkait dengan pengelolaan keuangan desa,
- f. Kesiambungan maintenance karena merupakan aplikasi resmi pemerintah,
- g. Aplikasi dapat diintegrasikan dengan aplikasi terkait pengelolaan keuangan desa lainnya, seperti aplikasi OM-SPAN milik Kementerian Keuangan (kemenkeu) dan SIPEDE milik Kemendesa PDTT.

Sedangkan Tujuan dari aplikasi Siskeudes antara lain:

- a. Memastikan seluruh ketentuan dan kebijakan dalam implementasi UU Desa khususnya keuangan dan pembangunan desa dapat dilaksanakan dengan baik untuk seluruh tingkatan pemerintah.
- b. Pemerintah desa dapat melaksanakan siklus pengelolaan keuangan desa secara akuntabel mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan.

## **METODE PENELITIAN**

### **Jenis Penelitian**

Dalam penelitian ini, metode yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Pendekatan kualitatif menurut sugiyono (2016:9) adalah metode penelitian yang berlandaskan filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, artinya data yang dikumpulkan bukan berupa angka-angka, melainkan data tersebut berasal dari naskah wawancara, catatan lapangan, dokumen pribadi, catatan memo, dan dokumen resmi lainnya.

### **Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian ini dilakukan di Desa Kebun Durian, Kecamatan Gunung Sahilan, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau. Pemilihan lokasi ini di latarbelakangi oleh tingkat pemahaman perangkat desa terutama Sekretaris Desa dan Kaur Keuangan Desa akan pentingnya Siskeudes, sehingga dapat dilihat bagaimana perangkat desa dalam menerima aplikasi Siskeudes.

### **Informan Penelitian**

Informan penelitian adalah narasumber yang merujuk pada seseorang yang paham terkait dengan objek penelitian serta mampu memberikan penjabaran tentang topik penelitian yang di angkat (Sugiyono, (2010)).

1. Kepala Desa
2. Sekretaris Desa
3. Kaur Keuangan
4. Badan Permusyawaratan Desa (BPD)
5. Masyarakat

### **Teknik Pengumpulan Data**

Dalam penelitian ini, Teknik pengumpulan data yang dilakukan menggunakan Wawancara dan Dokumentasi. Wawancara peneliti lakukan kepada para informan yang telah

disebutkan sebelumnya. Selanjutnya dokumentasi yang dilakukan dalam bentuk foto bukti wawancara dengan informan serta foto sejumlah data seperti struktur organisasi, dan sebagainya.

### **Jenis dan Sumber Data**

Sumber data adalah segala sesuatu yang dapat memberikan informasi mengenai data. Berdasarkan sumbernya, data dibedakan menjadi dua, yaitu data primer dan data sekunder.

#### **1. Data primer**

Data primer yaitu data yang dibuat oleh peneliti dan diperoleh secara langsung oleh peneliti. Biasanya Data primer diperoleh melalui wawancara dan observasi di lapangan. Data primer dalam penelitian ini adalah hasil wawancara dari berbagai narasumber, seperti perangkat desa Kebun Durian, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), masyarakat.

#### **2. Data sekunder**

Data sekunder yaitu data yang telah dikumpulkan untuk menunjang masalah yang sedang dihadapi. Data ini bersumber dari literatur, artikel, jurnal serta situs di internet yang berkenaan dengan penelitian yang dilakukan.

### **Analisis Data**

Menurut **Sari (2018:43)** analisis data dengan menggunakan pendekatan kualitatif dengan cara berpikir deduktif dengan melihat pola yang umum ke khusus. Dalam hal ini, pola yang umum tersebut adalah kerangka teoritis yang digunakan, sedangkan pola yang khusus adalah realitas yang ditemukan peneliti di lapangan.

Dalam membahas tentang analisis data, Model interaktif (Miles dan Huberman dalam Metodologi Penelitian Kualitatif 2020), mengajukan model analisis data yang disebutnya sebagai

model interaktif. Model ini terdiri dari tiga hal utama, yaitu (1) reduksi data; (2) penyajian data; dan (3) penarikan kesimpulan/verifikasi. Ketiga kegiatan tersebut merupakan kegiatan yang jalin-menjalin pada saat sebelum, selama, dan sesudah pengumpulan data dalam bentuk yang sejajar untuk membangun wawasan umum yang disebut analisis.

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 mengungkapkan bahwa keuangan desa merupakan semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa. Sedangkan pengelolaan keuangan desa merupakan keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban. Dalam melakukan keseluruhan kegiatan tersebut, diperlukan sebuah sistem sehingga pengelolaan keuangan lebih mudah dan teratur. Untuk mewujudkan pengelolaan keuangan desa yang mudah dan teratur tersebut, maka Pemerintah desa Kebun Durian menerapkan suatu aplikasi yang disebut dengan Sistem Keuangan Desa (Siskeudes).

#### **1. Pengelolaan Keuangan Desa Berbasis Aplikasi Siskeudes** **a. Perencanaan**

Perencanaan di Desa Kebun Durian sudah bertahap dengan semestinya dan sudah mengikuti aturan yang terdapat dalam permendagri nomor 20 tahun 2018. Akuntabilitas dari tahap perencanaan ini dapat dilihat dari proses sebelum penyusunan RPJM Desa, RKP Desa, maupun APBDes pemerintah desa Kebun Durian melibatkan masyarakat dalam prosesnya sehingga hal ini dapat dipertanggungjawabkan ketika pemerintah desa Kebun Durian menyampaikan

penyusunan program pembangunannya kepada pemerintah pusat bahwa penyusunan tersebut sesuai dengan harapan masyarakatnya.

- b. Pelaksanaan pelaksanaan pengelolaan di Desa Kebun Durian sudah berjalan dengan baik, hal itu dikarenakan setiap pelaksanaan kegiatan perangkat desa harus mengajukan SPP dalam proses pencairan dananya dengan disertai dengan laporan pertanggungjawaban serta laporan bukti transaksi yang lengkap dan sah. Sebelum adanya pencairan dilakukan dulu proses pengecekan Kembali oleh sekretaris desa apakah kegiatan pelaksanaan tersebut ada dalam APBDes atau tidak sebelum ditandatangani oleh kepala desa, sekretaris desa, kaur keuangan desa. Jika kegiatan tersebut tidak terinput atau tidak ada dalam anggaran tahun ini maka tidak boleh disetujui apalagi ditandatangani oleh ketiga pihak tadi maka dianggap tidak sah.
- c. Penatausahaan Dalam penatausahaan setiap proses pengeluaran dan penerimaan akan dicatat di dalam sistem tersebut. Oleh karena itu sebelum melakukan pencatatan Kaur Keuangan Desa harus teliti ketika memasukkan data ke dalam siskeudes karena setelah penginputan data, data akan terkunci dan tidak dapat di edit. Pencatatan oleh kaur keuangan sebelum masuk ke siskeudes juga perlu dicek lagi apakah sudah lengkap bukti dan laporannya, apakah sudah sesuai dengan yang terjadi oleh Sekretaris Desa baru dilaporkan ke Kepala Desa.
- d. Pelaporan Dalam proses pelaporan, Desa Kebun Durian menggunakan empat

jenis pelaporan yaitu laporan bulanan, laporan triwulan, laporan semester dan laporan tahunan. pelaporan dibuat oleh kaur keuangan desa selaku operator siskeudes. Pelaporan desa Kebun Durian menggunakan dua cara yaitu online melalui siskeudes, dan pelaporan hardcopy yang memerlukan laporan bukti transaksi. Pelaporan ini disampaikan kepala desa kepada Bupati melalui Camat.

- e. Pertanggungjawaban Pertanggungjawaban di Desa Kebun Durian dilaksanakan oleh Kepala Desa dalam akhir tahun. Selain melaporkan realisasi pelaksanaan APBDes ke bupati melalui camat, dan juga proses pertanggungjawaban kepada BPD dan unsur masyarakat lainnya.
2. faktor Penghambat Pengelolaan Keuangan Desa Berbasis Aplikasi Siskeudes
  - a. Sumber Daya Manusia Sumber Daya Manusia (SDM) adalah satu unsur yang sangat penting dalam penyelenggaraan pemerintah desa, karena sumber daya manusia (SDM) dilihat sebagai elemen penggerak dan perencana kegiatan dalam suatu organisasi. Maka dari itu, dalam pengelolaan keuangan desa yang baik dibutuhkan sumberdaya manusia yang kompeten.
  - b. Kelengkapan Fasilitas (Sarana-Prasarana)

Fasilitas adalah segala sesuatu yang dapat digunakan untuk memperlancar dan mempermudah pekerjaan dalam mencapai tujuan. Adanya kelengkapan fasilitas juga akan menentukan hasil kinerja yang optimal. Di kantor Desa Kebun Durian sendiri memiliki satu buah laptop yang digunakan untuk menunjang aktivitas di kantor. Ada kelengkapan lainnya yaitu terdapat dua buah printer, satu buah genset

yang digunakan untuk menunjang aktivitas kantor.

- c. Minimnya sosialisasi/pelatihan mengenai aplikasi Siskeudes

Setiap tahunnya aplikasi Siskeudes mengalami perubahan membuat para pegawai sulit untuk mengaplikasikannya, sehinggaperlu adanya pelatihan yang cukup agar pelaksanaan pengelolaan keuangan desa menggunakan aplikasi Siskeudes dapat berjalan dengan maksimal.

## KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dijabarkan pada bab sebelumnya, menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa, jadi pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban. Pengelolaan Keuangan Desa Berbasis Aplikasi Siskeudes di Desa Kebun Durian sudah diterapkan dengan baik, sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Operator dapat mengaplikasikannya dengan baik mesti beberapa kali mengalami kendala. Perangkat desa dalam penginputan data lebih efektif, efisien, dan akuntabel, serta transparan dalam melakukan pengelolaan keuangan desa. Pengelolaan keuangan yang baik meningkatkan kinerja aparatur dan kualitas laporan. Kinerja yang baik menghasilkan kualitas laporan yang baik sedangkan kualitas laporan yang baik meningkatkan integritas dan menjadi nilai tambah bagi Perangkat Desa Kebun Durian. Desa Kebun Durian sudah baik dalam mengoperasikan sistem dan melakukan pengelolaan sesuai peraturan yang ada.

## SARAN

Berdasarkan pada penelitian yang di lakukan dan hasil kesimpulan yang telah di peroleh, maka dapat di berikan saran sebagai berikut, Pemerintah Desa Kebun Durian harus meningkatkan kemampuan sumber daya manusia dalam mengoperasikan aplikasi Siskeudes secara baik, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban. Menumbuhkan semangat dan tanggungjawab yang tinggi dalam menyelesaikan urusan pemerintahan desa khususnya pengelolaan keuangan desa, bertanggungjawab mengelola keuangan desa. Kegiatan pengelolaan keungan desa harus mampu memberikan manfaat bagi masyarakat desa serta keuangan desa itu sendiri. Pemerintah desa Kebun Durian sebaiknya meningkatkan kemampuan atau skill operator dengan pelatihan dan bimbingan teknis langsung pada prakteknya bukan hanya sekedar pada penyampaian informasi. Pemerintah desaa sebaiknya memiliki operator khusus yang mengoperasikan aplikasi sistem keuangan desa (Siskeudes) dan diharapkan semua aparatur desa mengerti serta paham dalam mengoperasikan aplikasi tersebut agar pelaksanaan pengelolaan keuangan desa berbasis aplikasi Siskeudes menjadi lebih optimal.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ayu, dkk (2017). *Peranan Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) Terhadap Kinerja Pemerintah Desa ( Studi Kasus di Desa Kabakaba , Kecamatan Kediri ,Kabupaten Tabanan*. Universitas Pendidikan Ganesha.
- BPKP, (2015). *Peluncuran Siskeudes*. [http://www.bpkp.go.id/sakd/konten/2454/Peluncuran Siskeudes](http://www.bpkp.go.id/sakd/konten/2454/Peluncuran%20Siskeudes).
- Ferren Chika Yolanda, (2023). *Pengelolaan Dana Desa Dalam Meningkatkan Pembangunan*

*Infrastruktur Desa Kampung Baru Sentajo Raya Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2019-2020.* Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Universitas Riau.

Fitriani, Ririn (2018). *Implementasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) di Desa Bumiratu Kecamatan Pagelaran Kabupaten Pingsewu.* Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung.

Khairiyah, N., & Zulkarnaini, Z. (2021). *Efektivitas Pelaksanaan Program Satu Keluarga Satu Serjana Oleh Bazna di Kabupaten Kampar.* Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Universitas Riau.

Novirania, Aziza (2018). *Implementasi Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) di Desa Bogorejo, Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran.* Universitas Lampung.

Sulina, dkk (2017). *Peranan Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) Terhadap Kinerja Pemerintah Desa ( Studi Kasus di Desa Kabakaba, Kecamatan Kediri Kabupaten Tabanan).* Universitas Pendidikan Ganesha.

Zulkarnaini, Z., & Gevisioner, G. *Differences Perception and Interest in Peatland Management Policy.* Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Universitas Riau.

Zurriyatul Husna, Mayarni (2022). *Efektivitas Pelayanan Kartu Identitas Anak (KIA) Melalui OASE (Online Anywhere Service) Pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tanah Datar.* Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Universitas Riau. Pekanbaru